

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal & Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta semua unsur mulai dari pimpinan, pejabat administrator, pejabat pengawas, sub koordinator dan unsur pelaksana yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini. Tujuan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dengan penanganan yang baik (good governance/yang amanah) dan bersih (clear governance) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran, pelaksanaan program kerja dan Penggunaan Anggaran tahun 2025 dalam mencapai tujuan.

LKjIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun tahun 2025 merupakan rangkaian proses Akuntabilitas Penjabaran Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2026 kedalam perencanaan sasaran, Program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2025. Selain itu penyusunan LKjIP untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Madiun, 19 Januari 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN



M. NGOR A FLAH, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19760907 200312 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan organisasi perangkat daerah di Tahun 2025. Dalam laporan ini disajikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2025, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran. Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran diukur capaiannya dan dianalisis dalam LKj ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi kinerja tujuan dan sasaran telah tercapai dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 sebesar Rp 32.083.822.378,00. Sedangkan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah Rp 31.141.568.236,00 atau sebesar 97,06% meningkat dari tahun 2024 sebesar 101,56%. Nilai Efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian kinerja, alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada angka 97,06% dengan kategori “Sangat Efisien”.

Dari seluruh target kinerja yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah tercapai secara keseluruhan meskipun tidak meningkat secara signifikan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik
Indikator : Indeks SPBE
Target 4,5 nilai, realiasi 4,57 dengan nilai capaian kinerja 101,56%
2. Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator : Indeks Pelayanan Publik
Target 4,83 nilai, realiasi 4,89 nilai dengan capaian kinerja 101,2%
3. Sasaran 2 : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi
Indikator : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik
Target 96 nilai, realiasi: 98,9 nilai dengan capaian kinerja 103%
4. Sasaran 3 : Peningkatan Layanan SPBE
Indikator : Persentase Nilai Domain Layanan SPBE

Target 4,5 nilai, realiasi 4,82 nilai dengan capaian kinerja 107,1%

5. Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Indikator : Persentase Indeks Satu Data Indonesia

Target 80 nilai, realiasi 75,27 nilai dengan capaian kinerja 94,1%

6. Sasaran 5 : Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi

Indikator : Persentase Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Target 560 nilai, realiasi: 874 nilai dengan capaian kinerja 156%

Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah menunjukkan hasil yang baik dan melampaui sebagian besar target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa indikator agar kinerja yang dihasilkan semakin optimal dan berkelanjutan.

**DIS
KOM
INFO.**
MADIUNKOTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR GRAFIK	viiiix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. GAMBARAN UMUM	4
SUSUNAN ORGANISASI	5
E. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED).....	9
F. PERMASALAHAN UTAMA	9
G. ISU GENDER	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS.....	14
1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	15
2. Sasaran	15
3. Strategi dan Kebijakan	17
B. PERJANJIAN KINERJA.....	18
1. Sasaran dan Indikator Sasaran	19
2. Program dan Kegiatan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
1.1 AKUNTABILITAS KINERJA	24
2.1. METODE PENGUKURAN	26
2.2. REALISASI KINERJA TAHUN 2025	26
2.2.1. Tujuan Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik.....	27
2.2.2. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	30
2.2.3. Sasaran Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	36
2.2.4. Peningkatan Layanan SPBE	41
2.2.5. Sasaran Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	45
2.2.6. Sasaran Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	51
2.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
A. REALISASI ANGGARAN.....	56
B. EFISIENSI ANGGARAN	61
C. PEMANFAATAN DATA CAPAIAN KINERJA UNTUK PERENCANAAN TAHUN BERIKUTNYA.....	64
D. INOVASI	65

BAB IV PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. PERMASALAHAN	69
C. UPAYA MENINGKATKAN KINERJA	70
LAMPIRAN	72
A. POHON KINERJA	72
B. MATRIK RENSTRA	78
C. PERJANJIAN KINERJA 2025	88
D. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV	91
E. DOKUMENTASI PENGHARGAAN	92

**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisa Responsif Gender (ARG).....	12
Tabel 1.2 Matriks Analisis Gender.....	13
Tabel 2.1 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator Sasaran, dan Pagu Anggaran Tahun 2025....	19
Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator, Target dan Anggaran Tahun 2025	23
Tabel 3.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran.....	26
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Tahun 2025	28
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir	26
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tujuan dibandingkan dengan Target Akhir Renstra	26
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tujuan dibandingkan dengan Nasional/ Provinsi	29
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Target Tahun 2025	31
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir	33
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra	34
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dibandingkan dengan Provinsi/Nasional.....	34
Tabel 2.2.3.1.1 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Target Tahun 2025	36
Tabel 2.2.3.1.2 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir	37
Tabel 2.2.3.1.3 Realisasi Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra.....	39
Tabel 2.2.3.1.4 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Dibandingkan Dengan Provinsi/Nasional.....	29
Tabel 2.2.4.1.1 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Target Tahun 2025.....	31
Tabel 2.2.4.1.2 Domain Layanan Spbe Kota Madiun Tahun 2024	42
Tabel 2.2.4.1.3 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir	33
Tabel 2.2.4.1.4 Realisasi Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra	44
Tabel 2.2.4.1.5 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Dibandingkan Dengan Provinsi/Nasional.....	34
Tabel 2.2.5.1.1 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Target Tahun 2025	34
Tabel 2.2.5.1.2 Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Madiun Tahun 2025	36

Tabel 2.2.5.1.3 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir	37
Tabel 2.2.5.1.4 Realisasi Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Tabel 2.2.5.1.5 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Dibandingkan Dengan Provinsi/Nasional.....	41
Tabel 2.2.6.1.1 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Target Tahun 2025.....	51
Tabel 2.2.6.1.2 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir	52
Tabel 2.2.6.1.3 Realisasi Kinerja Sasaran Dibandingkan Dengan Target Akhir Renstra.....	44
Tabel 2.2.6.1.4 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Dibandingkan Dengan Provinsi/Nasional.....	53
Tabel 2.3.1 Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Sasaran	56
Tabel 2.3.2 Realisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	60
Tabel 2.3.3 Penghitungan Ero Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025	63
Tabel 2.3.4 Data Capain Kinerja Tahun 2021-2025	65

**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	1
Gambar 3.1 Indeks Pelayanan Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025	32
Gambar 3.2 Hasil penilaian keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025.....	37
Gambar 3.3 Indeks KAMI Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025.....	52

**DIS
KOM
INFO.**
MADIUNKOTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Nilai IPP Setiap Aspek Dinas Komunikasi dan Informatika	32
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik 5 Tahun Terakhir	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 5 Tahun Terakhir	38
Grafik 3.4 Capaian Kinerja Nilai Domain Layanan SPBE 5 Tahun Terakhir	43
Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indeks Satu Data Indonesia 5 Tahun Terakhir.....	48
Grafik 3.6 Capaian Kinerja Keamanan Informasi 5 (Lima) Tahun Terakhir..	53

**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja (LKj), berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Laporan Kinerja (LKj) sekurang-kurangnya menyajikan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian indikator kinerja.

Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif sesuai dengan data dan keadaan yang terjadi pada tahun

anggaran tersebut, diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah salah satu dari Instansi-instansi yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, dan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam tahun anggaran 2025.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Negara;
 7. Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
 14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
 15. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/334/2021 tentang Rincian Tugas Subkoordinator Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Sedangkan tujuan dari pelaporan kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, sesuai dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. GAMBARAN UMUM

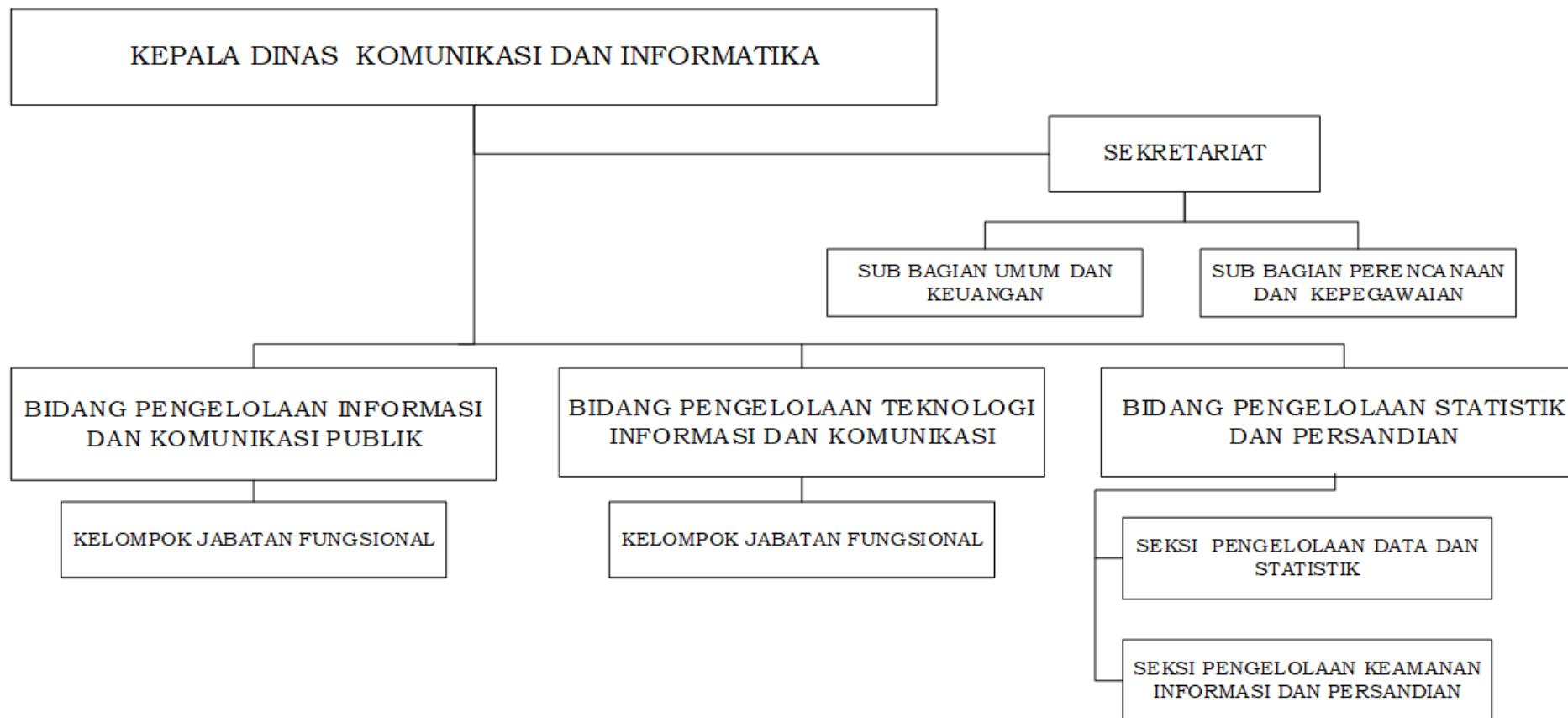
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Bagan susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA MADIUN NOMOR 72 TAHUN 2021**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Tugas dan fungsi masing-masing bagian diuraikan secara rinci pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Secara ringkas tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Tugasnya adalah memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur pembantu dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan masing-masing bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) melakukan penyusunan perencanaan dan keuangan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- 3) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- 4) melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- 5) melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;

- 6) mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan; 3) melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 4) melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara, dan rapat dinas;
- 5) menyusun, mengolah, dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 6) melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian, dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) menyusun rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas;
- 8) menyusun rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian, terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Data dan Statistik; dan
- b. Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

Masing-masing unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

E. ISU STRATEGIS

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik Organisasi Perangkat Daerah;
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral;
4. Peningkatan pengelolaan keamanan data dan informasi.

F. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Berikut digambarkan mengenai identifikasi permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan kedinasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut :

1. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat;
2. Tantangan dalam menangkal berita bohong dan misinformasi di ruang digital;
3. Sistem informasi antar Perangkat Daerah belum sepenuhnya terintegrasi;
4. Belum optimalnya sinkronisasi dan pertukaran data antar instansi;
5. Kurangnya Kesadaran akan Keamanan Informasi;
6. Risiko serangan siber terhadap sistem pemerintahan semakin tinggi.
7. Terbatasnya SDM yang kompeten.

G. ISU GENDER

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat

maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Permendagri Nomor 15 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Untuk mengimplementasikan amanat tersebut Pemerintah Kota Madiun memberikan arahan kepada POKJA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk menyusun RAD PUG.

Proses Penyusunan Dokumen ARG yang pertama adalah dengan melakukan Analisis Gender dengan menyusun data terpilah gender pada setiap program/ kegiatan di masing-masing bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Pemerintah Daerah Kota Madiun menyusun dan merencanakan Anggaran yang responsif gender dengan sasaran kegiatan adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Program-program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah melalui Analisa Responsif Gender (ARG) adalah sebagai berikut :

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base Line)	Indikator Gender
Kebijakan : Meningkatkan pembinaan informasi kinerja pelayanan pemerintah Daerah yang tersebar luas ke masyarakat Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Jumlah Media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo Kota Madiun sebanyak 61 Media massa Jumlah wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo yang bertugas meliput di area Kota Madiun sebanyak 61 orang dengan rincian jumlah laki-laki 49 orang dan jumlah perempuan sebanyak 12	Akses : Adanya kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani profesi sebagai wartawan, namun untuk wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan Partisipasi : Tingkat Partisipasi dalam kegiatan Pemerintah Kota Madiun, jumlah	Lebih banyak laki-laki yang berminat berprofesi sebagai wartawan daripada perempuan	Adanya paradigma bahwa laki-laki lebih cocok menjadi wartawan daripada perempuan apalagi wartawan lebih banyak di luar/lapangan	Meningkatnya partisipasi dan kompetensi wartawan dalam menyebarkan kegiatan Pemerintah Kota Madiun, baik perempuan maupun laki-laki	Melaksanakan kegiatan forum kehumasan dan jumpa pers, serta <i>media gathering</i> secara rutin Output : Jumlah wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas	Kegiatan kegiatan forum kehumasan dan jumpa pers, serta <i>media gathering</i> secara rutin dalam satu tahun anggaran dengan mengundang wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo yang bertugas	Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak baik oleh wartawan laki-laki maupun perempuan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base Line)	Indikator Gender
Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat b Kegiatan : Tujuan : Meningkatnya partisipasi dan kompetensi wartawan dalam menyebarkan kegiatan Pemerintah Kota Madiun Sasaran : Media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo Kota Madiun	orang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebanyak 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki	laki-laki lebih banyak daripada perempuan Kontrol : Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan organisasi PWI Madiun, laki-laki lebih mendominasi Manfaat : Penerima manfaat dari adanya kegiatan ini, proporsi wartawan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan wartawan perempuan				Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	meliput di area Kota Madiun sebanyak 61 orang dengan rincian jumlah laki-laki 49 orang dan jumlah perempuan sebanyak 12 orang	

Tabel 1.1 Analisa Responsif Gender (ARG)

	Dinas Komunikasi dan Informatika	
TAHUN ANGGARAN	2025	
PROGRAM/KEGIATAN/ TUJUAN	Program :	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan :	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
	Sub Kegiatan :	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
	Tujuan :	
	Meningkatnya partisipasi dan kompetensi wartawan dalam menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Kota Madiun	
KODE PROGRAM	1.11.1.11.01.16	
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan : - Jumlah Media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo Kota Madiun sebanyak 61 Media massa - Jumlah wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo yang bertugas meliput di area Kota Madiun sebanyak 61 orang dengan rincian jumlah laki-laki 49 orang dan jumlah perempuan sebanyak 12 orang - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebanyak 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki Isu Gender dan Faktor Kesenjangan : Akses : Adanya kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani profesi sebagai wartawan, namun untuk wartawan media massa yang bermitra dengan Dinas Kominfo, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan Partisipasi : Tingkat Partisipasi dalam kegiatan Pemerintah Kota Madiun, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan Kontrol : Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan organisasi PWI Madiun, laki-laki lebih mendominasi Manfaat : Penerima manfaat dari adanya kegiatan ini, proporsi wartawan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan wartawan perempuan Penyebab Kesenjangan Internal : Lebih banyak laki-laki yang berminat berprofesi sebagai wartawan daripada perempuan Penyebab Kesenjangan Eksternal : Adanya paradigma bahwa laki-laki lebih cocok menjadi wartawan daripada perempuan apalagi wartawan lebih banyak di luar/lapangan	
CAPAIAN PROGRAM	Tolak Ukur : Meningkatnya partisipasi dan kompetensi wartawan dalam menyebarluaskan kegiatan Pemerintah Kota Madiun, baik wartawan perempuan maupun laki-laki Indikator Kinerja : Tersebar luaskannya informasi pembangunan daerah yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan cetak baik oleh wartawan laki-laki maupun perempuan	
JUMLAH ANGGARAN	Rp 200.000.000,00	
RENCANA AKSI	Masukan	Rp 200.000.000,00
	Sub Kegiatan	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
	Keluaran	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
	Hasil	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah

Tabel 1.2

Matriks Analisis Gender

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Laporan kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi nya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerjanya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Tujuan, Sasaran, serta Kebijakan Program dan Kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam memberikan Pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam mendukung visi Kota Madiun “Terwujudnya Pemerintahan Maju Bersih Berwibawa Bersama Masyarakat Membangun Kota Mendunia”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kota Madiun mempunyai misi pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
3. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan harmoni sosial, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis keterbukaan informasi publik;
6. Meningkatkan integritas pemerintahan dengan budaya anti-korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inovasi dalam pembangunan;
8. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat yang berkualitas.

Sehubungan dengan misi Kota Madiun diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendukung pencapaian misi ke 6 yaitu “Meningkatkan integritas pemerintahan dengan budaya anti-korupsi dan pelayanan publik yang bersih dan profesional.”. Dapat dijabarkan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan jawaban dari isu-isu strategis yang ada. Tujuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerjemahan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai untuk menuju masyarakat sejahtera. Adapun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah: “Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik.”

2. Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dirumuskan dalam

bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi
- 3. Peningkatan Layanan SPBE
- 4. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- 5. Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi

Guna mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
			2025	2026
	Tujuan			
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik.	Indeks SPBE	4,5 Nilai	-
	Sasaran			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,83 Nilai	4,7 Nilai
2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96 Nilai	96.5 Nilai
3	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4,5 Nilai	-
4	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	80 Nilai	-
5	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560 Nilai	626 Nilai

3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dan kebijakan agar pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud bisa lebih terarah. Adapun strategi dan kebijakan dimaksud adalah:

a. Strategi

- Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap transparansi dan efisiensi pelayanan diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan mudah dan cepat.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut diantaranya :

- 1) Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis mobile dan web.
- 2) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat berbasis digital untuk meningkatkan partisipasi publik.
- 3) Integrasi sistem informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi

Untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan berdaya saing, Dinas Kominfo terus mendorong keterbukaan informasi serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai elemen penting pembangunan kota.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut diantaranya :

- 1) Pengelolaan portal keterbukaan informasi publik yang transparan dan mudah diakses.
- 2) Sosialisasi literasi digital kepada masyarakat melalui seminar dan pelatihan.
- 3) Pengembangan layanan informasi berbasis aplikasi yang mempermudah masyarakat mengakses berita dan kebijakan kota.

b. Kebijakan yang diambil untuk pencapaian sasaran dan tujuan diantaranya:

Pada tahun 2025, arah kebijakan menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur teknologi yang menunjang penyediaan informasi publik dan layanan publik digital. Selanjutnya, pada tahun

2026 diarahkan pada pengembangan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi serta penyederhanaan aturan dan regulasi dalam pelayanan publik.

Oleh karenanya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan strategi yang selaras dengan arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta arah kebijakan RPJMD dalam pencapaian target selama kurun waktu periode renstra. Strategi ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan benar-benar terarah, terukur, serta memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Dengan adanya strategi dan arah kebijakan yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dapat berjalan secara sistematis, mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan inovatif. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Lebih jauh lagi, arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi landasan dalam memperkuat integrasi antar perangkat daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyiapkan infrastruktur digital yang handal. Dengan demikian, strategi yang disusun tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan jangka panjang, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2025-2026, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Kinerja Tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,83 Nilai
2.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96 Nilai
3.	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4,5 Nilai
4.	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	80 Nilai
5.	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560 Nilai

2. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur (outcome) sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output). Kegiatan terbagi atas sub kegiatan.

Tabel 2.3 Sasaran, Indikator Sasaran, dan Pagu Anggaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Anggaran
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	7.491.731.334,26
2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	2.930.696.356,00
3	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	21.413.896.687,74
4	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	100.523.000,00
5	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	146.975.000,00

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator, Target dan Anggaran Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,25 Nilai	7.491.731.334,26
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	9.380.000
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.380.000
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	3.424.436.462
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.424.436.462
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	200.000.000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	200.000.000
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	12.050.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-
	Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12.050.000
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	3.351.647.883,52
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.351.647.883,52
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	494.216.989
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	285.721.000,74
	Sub Kegiatan:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	67.510.000

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi		
	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	140.985.988
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84%	2.930.696.356,00
	Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	2.930.696.356,00
	Sub Kegiatan: Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	698.265.650
	Sub Kegiatan: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	153.441.656
	Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	140.606.760
	Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publi	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	23.800.000
	Sub Kegiatan: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	7.000.000
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	582.375.000
	Sub Kegiatan: Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1.289.877.290
	Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	35.330.000
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	21.413.896.687,74

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	227.550.000
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	227.550.000
	Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	21.186.346.688
	Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	64.998.555
	Sub Kegiatan: Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	366.868.000
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	311.400.000
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	804.855.635
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	5.653.648.638
	Sub Kegiatan: Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	13.984.575.860
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	100.523.000,00
	Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	100.523.000
	Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100.523.000

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	45.605.500
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	37.173.500
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	146.975.000,00
	Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	146.975.000
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	146.975.000
	Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	29.920.000

KOM
INFO.
MADIUNKOTA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Penilaian keberhasilan atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Renstra dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama satu tahun.

Penyusunan LKj ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategi dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2025.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal yang perlu dibedakan adalah antara kinerja yang akan diukur dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur. Apabila kinerja menunjukkan suatu kondisi, maka indikator kinerja merupakan alat yang memberikan gambaran atau penilaian mengenai kondisi tersebut.

Sedangkan evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan pembandingan antara :

1. Target dengan realisasi kinerja tahun berjalan;
2. Realisasi dan capaian kinerja, dengan realisasi dan capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir;
3. Realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada renstra;
4. Realisasi kinerja dengan standar nasional.

1. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). masa yang akan datang. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja adalah indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Untuk memberikan suatu penilaian atas capaian kinerja diperlukan nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja dengan memberikan atribut pada capaian masingmasing indikator kinerja, yang dibedakan atas beberapa macam kategori.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 bahwa kategori capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja	Bobot	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Sangat Baik/Istimewa	5	Di atas ekspektasi
2	100 %	Baik	4	Sesuai ekspektasi
3	80 % ≤ 99 %	Cukup	3	Di bawah ekspektasi
4	60 % ≤ 79 %	Kurang	2	
5	0 % ≤ 59 %	Sangat Kurang	1	

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri

2. Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 telah tercapai dengan kategori Sangat Baik/Istimewa.

Target Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai tolak ukur kinerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan berlaku pada tahun 2025 (Renstra 2025-2026, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Kinerja sebagai berikut :
Tujuan : Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik

Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran 2 : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi

Sasaran 3 : Peningkatan Layanan SPBE

Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Sasaran 5 : Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi

Adapun realisasi dari Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut :

2.1. Tujuan Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik

a. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berbasis elektronik, Perangkat Daerah menetapkan Indeks SPBE sebagai indikator tujuan. Pada Tahun 2025, target Indeks SPBE ditetapkan sebesar 3,25 nilai.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Indeks SPBE Tahun 2025 mencapai 4,57 nilai, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 140,62%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan SPBE telah melampaui target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE secara terintegrasi.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Target Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,25 Nilai	4,57 Nilai	120%

b. Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Dengan 4 Tahun Terakhir

Realisasi Indeks SPBE dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 capaian berada pada 3,06 nilai, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,86 nilai.

Peningkatan kinerja terjadi secara signifikan pada tahun 2023 dengan capaian 4,45 nilai, dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 4,57 nilai. Sementara itu, pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian Indeks SPBE, sehingga nilai yang digunakan merupakan hasil penilaian tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,06 Nilai	2,86 Nilai	4,45 Nilai	4,57 Nilai	4,57 Nilai

c. Perbandingan Realiasasi Indikator Tujuan dengan Target Akhir Renstra

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berbasis elektronik, Target Akhir Renstra untuk Indeks SPBE ditetapkan sebesar 3,25 nilai. Berdasarkan

hasil evaluasi kinerja, realisasi yang dicapai sebesar 4,57 nilai, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 140,62%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah telah melampaui Target Akhir Renstra, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program dalam penguatan tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE secara terintegrasi.

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tujuan
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,25 Nilai	4,57 Nilai	120%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Dengan Provinsi/Nasional

Realisasi Indeks SPBE Kota Madiun mencapai 4,57 nilai, yang berada di bawah capaian Provinsi sebesar 4,79 nilai, namun jauh melampaui capaian Nasional yang sebesar 3,23 nilai. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE di Kota Madiun telah berada pada kategori sangat baik dan lebih unggul dibandingkan rata-rata Nasional.

Meskipun masih terdapat selisih dengan capaian Provinsi, kinerja SPBE Kota Madiun telah mencerminkan efektivitas pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Ke depan, diperlukan penguatan integrasi layanan dan inovasi digital untuk meningkatkan capaian agar setara atau melampaui capaian Provinsi.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tujuan
dibandingkan dengan Nasional/ Provinsi

No	Tujuan	Indikator	Kota Madiun	Provinsi	Nasional
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Indeks SPBE	4,57 Nilai	4,79 Nilai	3,23 Nilai

- e. Analisis atas ketercapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan serta rencana tindak lanjut kedepan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian tujuan ini antara lain:

1. Tersedianya kebijakan dan regulasi internal yang mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
2. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung penerapan sistem berbasis elektronik.
3. Sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.
4. Penerapan tata kelola SPBE yang mendorong efektivitas administrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik digital.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut meliputi:

1. Penguatan arsitektur dan tata kelola SPBE serta penyempurnaan SOP pelayanan berbasis elektronik.
2. Pengembangan dan optimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.
3. Peningkatan integrasi sistem dan pemanfaatan data antar unit dan perangkat daerah.
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan di bidang teknologi informasi dan pelayanan digital.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

1. Integrasi dan interoperabilitas sistem layanan belum sepenuhnya optimal.
2. Tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat belum merata.

Sebagai rencana tindak lanjut, Perangkat Daerah akan :

1. Memperkuat integrasi dan interoperabilitas layanan berbasis elektronik.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang SPBE dan pelayanan publik digital.
3. Mengembangkan inovasi layanan berbasis elektronik yang lebih mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2.2. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik pada Sekretariat diarahkan untuk memperkuat dukungan administrasi, tata kelola organisasi, serta layanan internal yang efektif dan efisien guna

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah. Melalui pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta layanan umum yang tertib dan akuntabel, Sekretariat berperan dalam memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih optimal.

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Tahun 2025

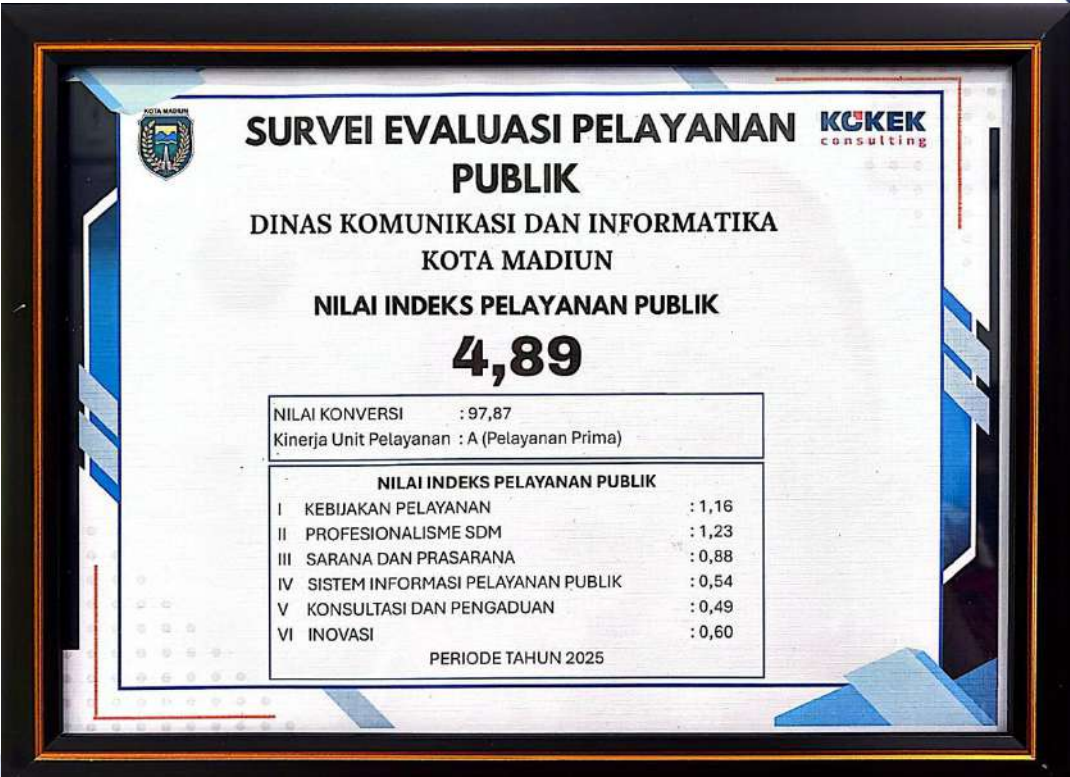
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.83 Nilai	4.89 Nilai	101,2%

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis elektronik, Indikator Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2025 Target indikator Indeks Pelayanan Publik adalah 4.83 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah 4.89 (Nilai) dengan capaian 101,2%.

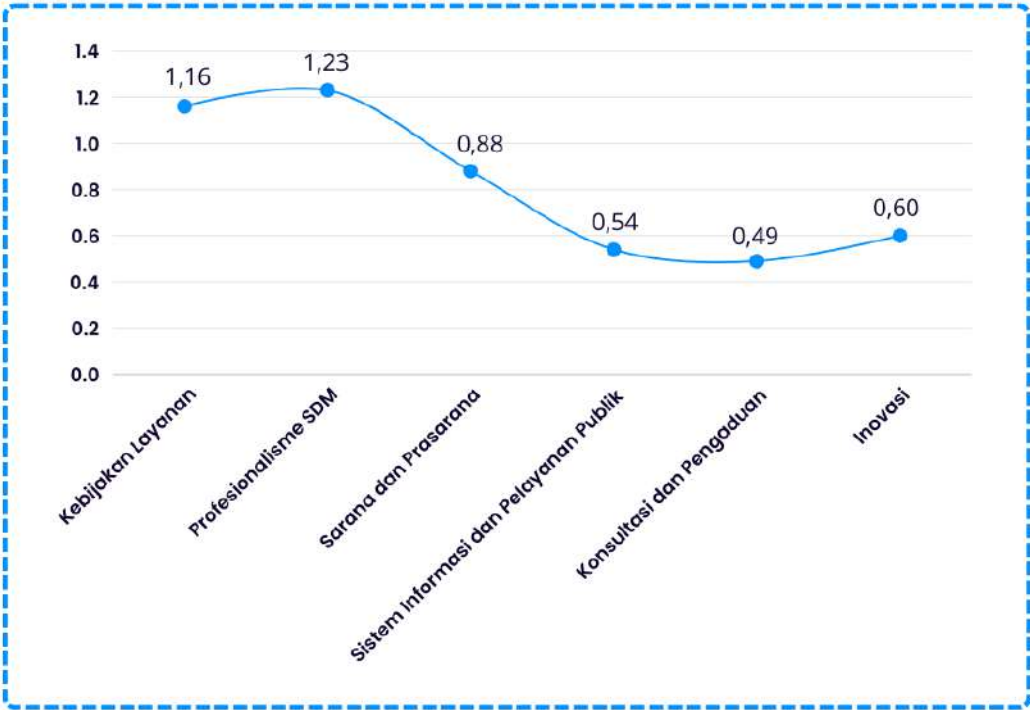
Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik perangkat daerah dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut.

1. Mendapat feedback/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/penerima layanan guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.
2. Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan.
3. Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik masing-masing Unit Pelayanan Publik.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Indeks pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025

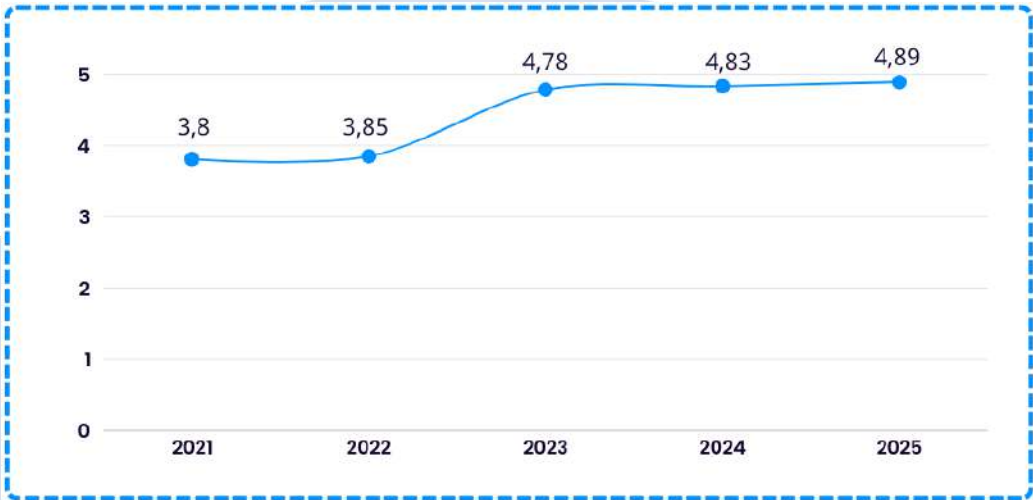


Grafik 3.1 Nilai IPP Setiap Aspek Dinas Komunikasi dan Informatika

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,8 Nilai	3,85 Nilai	4,78 Nilai	4,83 Nilai	4,89 Nilai



Grafik 3.2 Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik 5 (lima) Tahun Terakhir

Pada tahun 2021, indeks pelayanan publik ini berada pada angka 3,8 dan terus meningkat setiap tahunnya, dengan kenaikan yang lebih signifikan pada tahun 2023 sebesar 4,78. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan indeks mencapai 4,83.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan publik, seperti peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Ke depan, perlu dilakukan penguatan sistem pelayanan berbasis digital dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan guna mempertahankan tren positif ini.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Akhir Renstra

Dalam rangka mencapai tujuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Target Akhir Renstra untuk Indeks Pelayanan Publik ditetapkan sebesar 4,83 nilai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi yang

dicapai sebesar 4,89 nilai, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,2%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah telah melampaui Target Akhir Renstra, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan berbasis elektronik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Sasaran
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.83 Nilai	4.89 Nilai	101,2%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dengan Provinsi/Nasional

Indikator Indeks Pelayanan Publik menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Mengingat tidak tersedianya data nilai Indeks Pelayanan Publik pada tingkat nasional, maka capaian Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai representasi rujukan. Hal ini didasarkan pada posisi Jawa Timur sebagai daerah dengan nilai tertinggi di Indonesia, sehingga nilainya dijadikan standar acuan pada indikator ini.

Sementara itu, pada tingkat Kota Madiun, capaian Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,89, yang lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Madiun telah berjalan sangat optimal dan melampaui standar kinerja nasional, sebagai hasil dari peningkatan kualitas layanan, inovasi pelayanan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran
dibandingkan dengan Provinsi/Nasional

No	Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi	Nasional
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,75 Nilai	4,75 Nilai	N/a

- e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang jelas terkait standar pelayanan publik dan kebijakan internal yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan.
2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi untuk mendukung pelayanan digital.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten.
4. Transparansi informasi melalui website resmi, media sosial, dan layanan PPID.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Menyusun dan memperbarui SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi
2. Memastikan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Mengembangkan portal layanan publik berbasis SPBE serta integrasi layanan digital dengan OPD lain untuk akses data yang lebih mudah.
4. Mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai terkait teknologi informasi dan pelayanan publik
5. Mengoptimalkan website dan media sosial resmi sebagai kanal informasi yang transparan

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas layanan berbasis digital, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi layanan publik, serta penguatan integrasi data dan informasi antar perangkat daerah guna mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2026 antara lain :

1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik dan penguatan layanan berbasis digital melalui pengembangan serta optimalisasi

pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis elektronikMengadakan pelatihan intensif bagi pegawai terkait teknologi informasi dan pelayanan digital.

2.3. Sasaran Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi

Sasaran peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penyediaan dan diseminasi informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan berbagai media komunikasi publik, baik media digital, media sosial, maupun media publikasi lainnya sebagai sarana penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

- 2.2.3.1. Sasaran 2:“Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi”
a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Dengan Target Tahun 2025

Target indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik adalah 96 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah 98,9 (Nilai) kategori INFORMATIF dengan capaian sebesar 103%.

Penilaian keterbukaan informasi publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) secara rutin melaksanakan penilaian keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Badan Publik di wilayahnya. Tujuan utama dari Monev ini adalah untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96 Nilai	98,9 Nilai	103%



Gambar 3.2 Hasil penilaian keterbukaan informasi publik
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun
Terakhir

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran
dengan Realisasi 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	97,33 Nilai	99,25 Nilai	96,71 Nilai	97,42 Nilai	98,9 Nilai



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan grafik capaian kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik selama periode 2021–2025, terlihat bahwa kinerja berada pada level yang tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 97,33, kemudian terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 99,25. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 96,71, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 97,42, dan terus meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai 98,90. Tren tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, secara umum upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dapat dipertahankan dengan baik dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Akhir Renstra

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, indikator Tingkat Keterbukaan Informasi Publik telah diukur sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah sebesar 94 nilai. Namun, berdasarkan data realisasi tahun 2025, capaian tingkat keterbukaan informasi publik telah melampaui target, dengan nilai sebesar 98,9.

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan dalam penyebaran serta aksesibilitas informasi publik. Pencapaian ini juga merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak dalam memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	94 Nilai	98,90 Nilai	105,2%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dengan Provinsi/Nasional

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat, dilakukan pengukuran Tingkat Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, pada tahun pelaporan ini data capaian tingkat keterbukaan informasi publik pada tingkat nasional tidak tersedia sehingga tidak dapat disajikan dalam tabel perbandingan. Sementara itu, pada tingkat Provinsi Jawa Timur, capaian tingkat keterbukaan informasi publik tercatat sebesar 98,72.

Di sisi lain, Kota Madiun menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 98,90, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Kota Madiun dalam mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme keterbukaan informasi publik secara efektif, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dibandingkan dengan Provinsi/Nasional

No	Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi	Nasional
1.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	98,90 Nilai	98,72 Nilai	N/a

- e. Analisis atas ketercapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan serta rencana tindak lanjut kedepan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
3. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Madiun (PPID Utama) maupun PPID pada perangkat daerah (PPID Pembantu);
4. Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi PPID Pembantu;
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek;
4. Pelaksanaan PPID Award, sebagai pendorong agar pengelolaan PPID bisa dilaksanakan secara maksimal.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik;

2. Kendala yang dialami pada PPID Pembantu, diantaranya :
- Terbatasnya SDM yang menangani PPID Pembantu;
 - SDM yang kurang handal dalam penulisan naskah berita dan pengelolaan sistem informasi.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Kota Madiun tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPID Pembantu; peningkatan kompetensi admin PPID Pembantu, dalam bentuk pelatihan, dan bimtek; serta PPID Award;
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Keterbukaan Informasi
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Kesadaran Keterbukaan Informasi.

2.4. Sasaran Peningkatan Layanan SPBE

Sasaran Peningkatan Layanan SPBE pada bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, aman, dan andal. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK, penguatan sistem aplikasi pemerintahan, peningkatan kapasitas jaringan dan pusat data, serta optimalisasi layanan digital yang mendukung kinerja perangkat daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan layanan SPBE juga difokuskan pada penguatan tata kelola teknologi informasi, keamanan informasi, serta integrasi data dan aplikasi antar perangkat daerah. Dengan langkah tersebut diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dapat semakin efektif dalam mendukung efisiensi kerja pemerintahan, transparansi, serta peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

- a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4,5 Nilai	4,82 Nilai	107,1%

Target indikator Nilai Domain Layanan SPBE tahun 2025 adalah 4,5 (Nilai). realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah 4,82 (Nilai) dengan capaian 107,1%.

Pengukuran layanan SPBE dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian mandiri oleh instansi pemerintah, penilaian administratif oleh evaluator, verifikasi substansi terhadap bukti dukung, serta wawancara pendalaman untuk memastikan kesesuaian implementasi layanan elektronik. Apabila diperlukan, dilakukan visitasi lapangan sebagai validasi akhir guna memastikan bahwa layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik telah berjalan sesuai standar dan arsitektur SPBE nasional. Namun, pada tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, realisasi capaian tahun 2025 menggunakan hasil evaluasi SPBE tahun 2024 sebagai data resmi terakhir yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja.

Tabel 3.12 Domain Layanan SPBE Kota Madiun Tahun 2024

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	4,57
Domain Kebijakan SPBE	4,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,80
Domain Tata Kelola SPBE	4,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	5,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5,00
Domain Manajemen SPBE	3,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	4,13
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,82
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	5,00

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

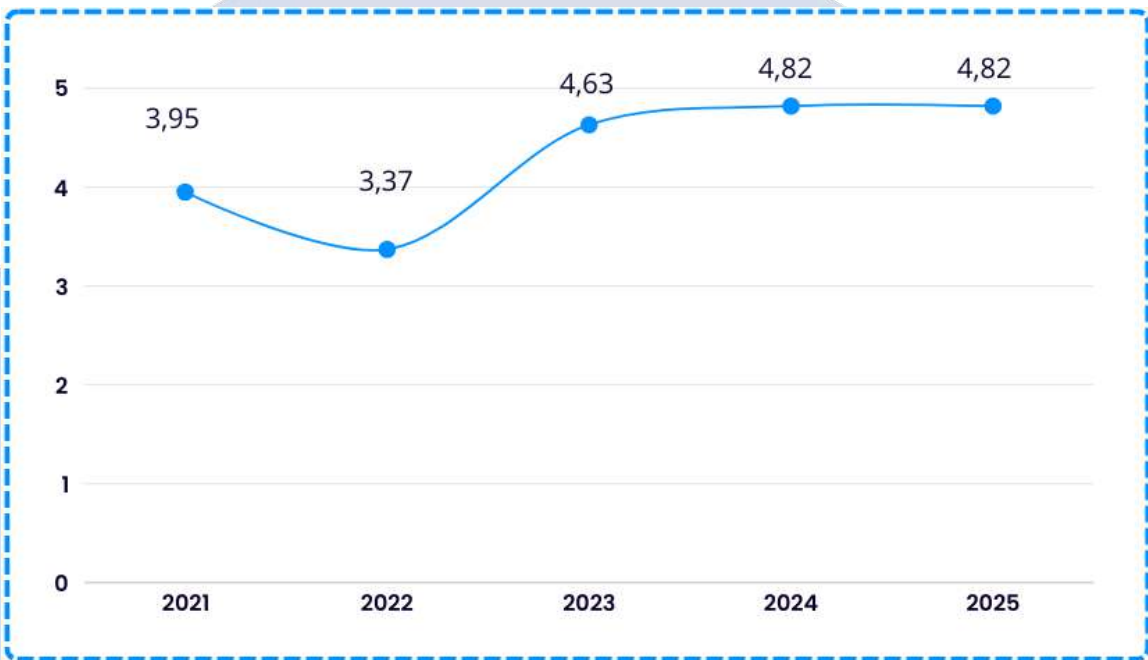
b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Capaian kinerja Nilai Domain Layanan SPBE selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2021 capaian nilai sebesar 3,95, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 3,37. Selanjutnya, capaian kinerja meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 4,63 dan relatif stabil pada tahun

2024 sebesar 4,82. Pada tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, realisasi capaian tahun 2025 menggunakan hasil evaluasi SPBE tahun 2024.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Realisasi 5 (lima) Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	3,95 Nilai	3,37 Nilai	4,63 Nilai	4,82 Nilai	4,82 Nilai



Grafik 3.4 Capaian Kinerja Tingkat Nilai Domain Layanan SPBE 5 Tahun Terakhir

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang melampaui target. Pada Sasaran Strategis Peningkatan Layanan SPBE, realisasi Nilai Domain Layanan SPBE tahun 2025 mencapai 4,82, sementara target Renstra ditetapkan sebesar 3,2. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah Renstra, yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan SPBE secara berkelanjutan.

Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	3,2 Nilai	4,82 Nilai	107,1%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dengan Provinsi/Nasional

Capaian kinerja Indikator Nilai Domain Layanan SPBE pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat baik di tingkat Kota Madiun. Nilai Domain Layanan SPBE Kota Madiun tercatat sebesar 4,89. Sementara itu, capaian Nilai Domain Layanan SPBE tingkat nasional dan Provinsi Jawa Timur masih belum dapat ditampilkan, karena “hasil evaluasi nasional dan provinsi belum dirilis secara rinci”, sehingga pada tabel ini dicantumkan sebagai N/a. Dengan demikian, capaian Kota Madiun dapat menjadi gambaran kinerja daerah yang telah berada pada kategori sangat baik dalam penyelenggaraan layanan SPBE.

Tabel 3.15 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dibandingkan dengan Provinsi/Nasional

No	Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi	Nasional
1.	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4,89 Nilai	N/a	N/a

e. Analisis atas ketercapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan serta rencana tindak lanjut kedepan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan kebijakan internal SPBE, meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Kebijakan Keamanan Informasi, Pembangunan Aplikasi SPBE, serta kebijakan terkait layanan pusat data dan layanan jaringan intra pemerintah daerah.
2. Tersedianya layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang telah berjalan optimal dan terintegrasi dengan aplikasi umum berbagi pakai seperti SIPD, SRIKANDI, SPSE, SIASN, dan SIMDA BMD.

3. Layanan publik berbasis elektronik sudah berjalan pada tingkat optimal, mencakup layanan pengaduan, layanan data terbuka, JDIH, serta layanan publik sektor 1-3.
4. Ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai, termasuk pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan yang mendukung interoperabilitas layanan.
5. Koordinasi yang efektif melalui Tim Koordinasi SPBE, sehingga pelaksanaan kebijakan SPBE dapat berjalan pada seluruh perangkat daerah.

Dalam rangka meningkatkan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.
2. Pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai untuk integrasi data dan layanan.
3. Penguatan penerapan manajemen SPBE (risiko, keamanan informasi, aset TIK, kompetensi SDM).
4. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah melalui Tim Koordinasi SPBE.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah:

1. Pelaksanaan audit TIK masih perlu ditingkatkan.
2. Kematangan manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan masih perlu diperkuat.
3. Diperlukan inovasi berkelanjutan agar layanan digital tetap adaptif.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan layanan SPBE tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan integrasi dan kualitas layanan administrasi serta layanan publik elektronik.
2. Memperkuat pelaksanaan audit TIK.
3. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPBE.
4. Mengembangkan inovasi layanan digital dan penyempurnaan Arsitektur serta Peta Rencana SPBE.
5. Mengoptimalkan koordinasi SPBE di seluruh perangkat daerah.

2.5 Sasaran Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Sasaran Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian diarahkan untuk mewujudkan

ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan perangkat daerah sebagai produsen data, peningkatan kapasitas pengelola data, serta penerapan standar dan metodologi statistik sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peningkatan kualitas data statistik sektoral juga didukung melalui pengembangan sistem pengelolaan data berbasis digital, pembinaan statistik sektoral kepada perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, data statistik yang dihasilkan dapat menjadi sumber informasi yang valid dan terpercaya dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data di lingkungan Pemerintah Daerah.

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4 Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	80 Nilai	75,27 Nilai	94,1%

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral pada Tahun 2025 diukur melalui indikator Indeks Satu Data Indonesia dengan target sebesar 80 nilai. Realisasi yang diperoleh adalah 75,27 nilai atau 94,1% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh bertambahnya komponen dan indikator penilaian dalam evaluasi Indeks Satu Data Indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan komponen penilaian ini menuntut perangkat daerah untuk memenuhi standar pengelolaan data yang lebih komprehensif, baik dari aspek perencanaan data, pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi data. Kondisi tersebut memerlukan proses penyesuaian serta penguatan

koordinasi dan kapasitas pengelola data di perangkat daerah agar seluruh komponen penilaian dapat terpenuhi secara optimal.

Ke depan, akan dilakukan penguatan pembinaan statistik sektoral, peningkatan koordinasi dengan produsen data, serta optimalisasi pengelolaan data melalui prinsip Satu Data Indonesia, sehingga kualitas data statistik sektoral dapat semakin meningkat dan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya

Hasil penilaian Tingkat kematangan data statistik sektoral Pemerintah Kota Madiun tahun 2025 :

Tabel 3.17 Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Madiun Tahun 2025

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	95.33
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	61.14
3	Domain Data Leadership	24%	91.51
Indeks Satu Data Indonesia			75.27

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Realisasi 5 (lima) Tahun Terakhir

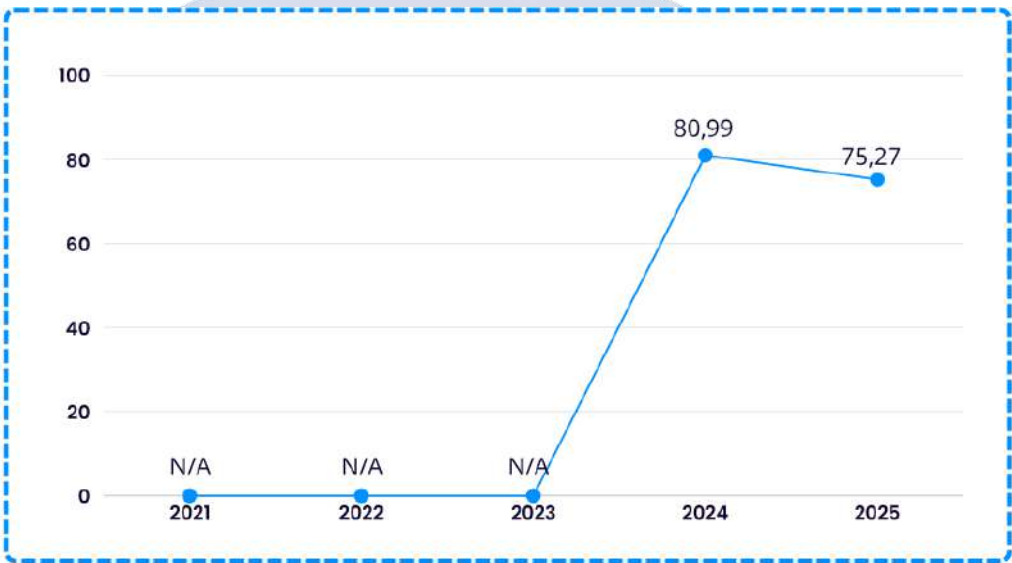
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	N/a	N/a	N/a	80,99 Nilai	75,27 Nilai

Capaian kinerja pada sasaran Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Indeks Satu Data Indonesia mulai diukur pada tahun 2024. Oleh karena itu, pada tahun 2021, 2022, dan 2023 belum terdapat nilai capaian (N/a) karena indikator tersebut belum digunakan sebagai indikator kinerja pada periode tersebut.

Pada tahun 2024, capaian Indeks Satu Data Indonesia tercatat sebesar 80,99 nilai. Selanjutnya pada tahun 2025, capaian sebesar 75,27 nilai. Meskipun terjadi penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan dan penambahan komponen penilaian dalam evaluasi Indeks Satu Data Indonesia,

sehingga standar penilaian menjadi lebih komprehensif dan menuntut pemenuhan aspek pengelolaan data yang lebih luas.

Dengan mulai diterapkannya indikator ini sejak tahun 2024, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait terus melakukan penguatan tata kelola data statistik sektoral, peningkatan koordinasi produsen data, serta pembinaan implementasi prinsip Satu Data Indonesia, sehingga kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan dapat mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan berbasis data.



Grafik 3.5 Capaian Kinerja Indeks Satu Data Indonesia 5 (lima) Tahun Terakhir

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Akhir Renstra

Indikator kinerja Indeks Satu Data Indonesia pada sasaran Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral merupakan indikator yang baru digunakan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, indikator tersebut belum tercantum dalam target akhir Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja tahun 2025 sebesar 75,27 nilai belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra, karena pada saat penyusunan dokumen Renstra indikator ini belum menjadi bagian dari indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian Indeks Satu Data Indonesia sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penerapan kebijakan Satu Data Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola data di lingkungan pemerintah daerah.

Ke depan, indikator ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, sehingga pengukuran kinerja terkait pengelolaan data statistik sektoral dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan

Tabel 3.19 Realisasi Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	-	75,27 Nilai	-

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dengan Provinsi/Nasional

Berdasarkan perbandingan capaian indikator Indeks Satu Data Indonesia, nilai yang diperoleh Kota Madiun pada tahun 2025 sebesar 75,27. Nilai tersebut masih berada di bawah capaian tingkat Provinsi yang mencapai 90,13. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan data statistik sektoral, khususnya dalam pemenuhan komponen penilaian Satu Data Indonesia seperti perencanaan data, standar data, metadata, serta interoperabilitas data antar perangkat daerah.

Sementara itu, untuk tingkat nasional belum tersedia nilai pembanding (N/a) sehingga perbandingan secara langsung dengan capaian nasional belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Madiun melalui perangkat daerah terkait akan terus melakukan penguatan tata kelola data, peningkatan koordinasi produsen data, serta pembinaan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia guna meningkatkan kualitas data statistik sektoral dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data di daerah.

Tabel 3.20 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dibandingkan dengan Provinsi/Nasional

No	Tujuan	Indikator	Kota Madiun	Provinsi	Nasional
1.	Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	75,27 Nilai	90,13 Nilai	N/a

- e. Analisis Atas Ketercapaian Kinerja Baik Keberhasilan Maupun Kegagalan Serta Rencana Tindak Lanjut Kedepan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, yaitu terbitnya Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun;
3. Monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan data sektoral Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi pengelolaan satu data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Meningkatkan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya data;
2. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral pada Perangkat Daerah;
3. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang statistik, disebabkan adanya moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang Statistik.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengelolaan data statistik sektoral tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi data statistik sektoral; dan pelaksanaan pendampingan pada perangkat daerah.
2. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Data Statistik
3. Pengembangan Infrastruktur Teknologi untuk Statistik Sektoral

4. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Statistik
5. Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Statistik Sektoral

2.6. Sasaran Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi

Sasaran peningkatan pengelolaan keamanan informasi pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian diarahkan untuk mewujudkan sistem pengamanan informasi pemerintah daerah yang andal, terintegrasi, dan mampu melindungi kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi. Upaya ini dilakukan melalui penerapan tata kelola keamanan informasi, penguatan sistem persandian, serta pengelolaan keamanan informasi pada infrastruktur dan aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah.

Selain itu, peningkatan pengelolaan keamanan informasi juga dilaksanakan melalui pembinaan dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penerapan kebijakan keamanan informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian, serta penerapan standar keamanan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan keamanan informasi yang baik, diharapkan seluruh data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi dari berbagai potensi ancaman serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang aman dan terpercaya

a. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Target Tahun 2025

Target indikator Indeks Kemanan Informasi (KAMI) adalah 560 (Nilai), realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah 874 (Nilai) dengan capaian 156%.

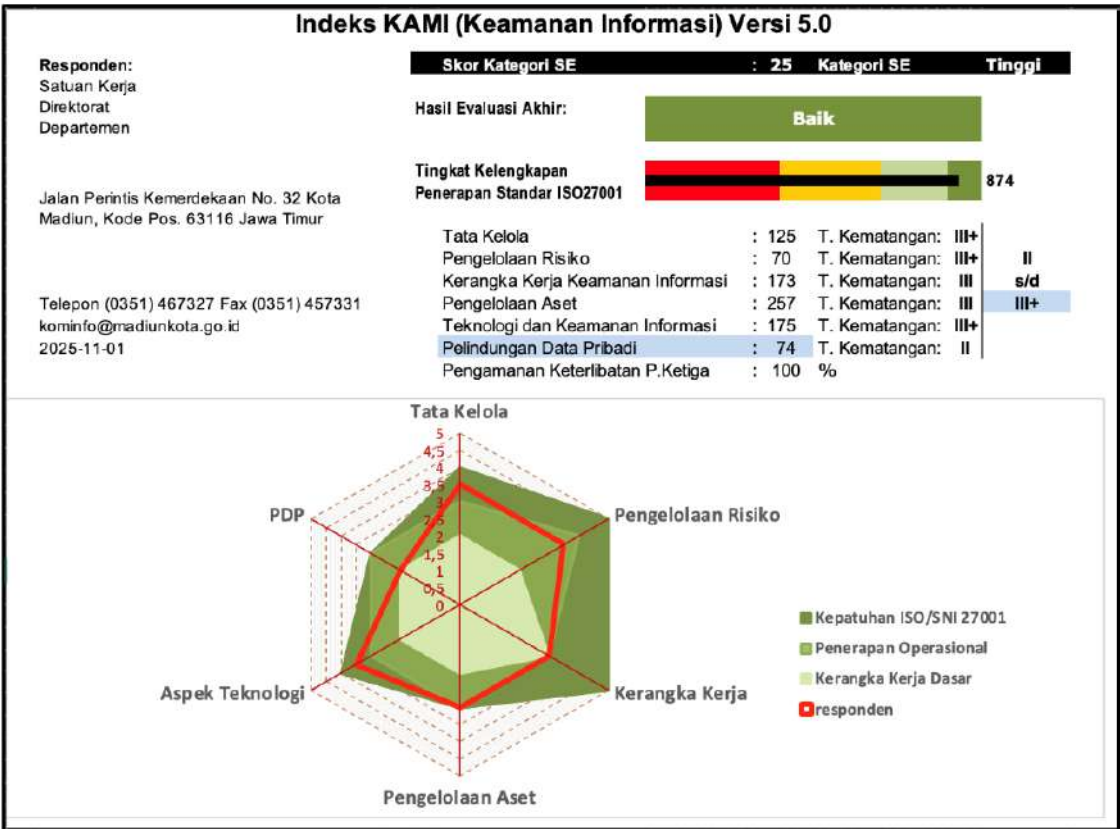
Pelaksanaan penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan proses evaluasi yang dirancang untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama:

- 1) **Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*):** Organisasi melakukan evaluasi internal dengan mengisi kuesioner yang mencakup berbagai aspek keamanan informasi, seperti tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan teknologi. Tujuan dari penilaian mandiri ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan.
- 2) **Verifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN):** Setelah penilaian mandiri, BSSN melakukan verifikasi terhadap hasil tersebut. Proses verifikasi ini mencakup evaluasi aspek-aspek yang telah dinilai

sebelumnya untuk memastikan akurasi dan validitas informasi yang diberikan oleh organisasi.

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560 Nilai	874 Nilai	156%



Gambar 3.3 Indeks KAMI Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025

b. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Dengan Realisasi 5 Tahun Terakhir

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Realisasi 5 (lima) Tahun Terakhir

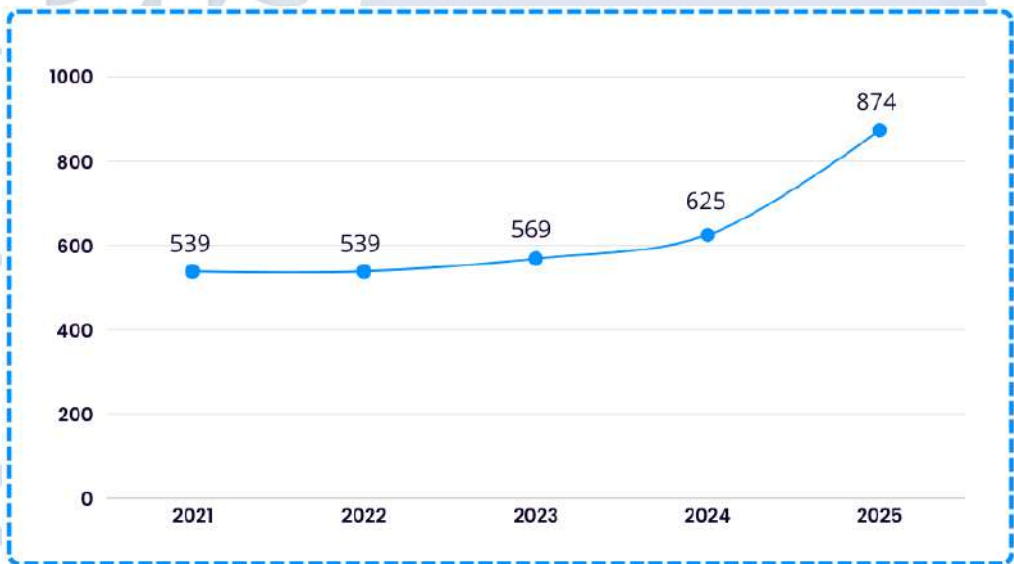
No	Tujuan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	539 Nilai	539 Nilai	569 Nilai	625 Nilai	874 Nilai

Capaian kinerja pada sasaran Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi yang diukur melalui indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai yang diperoleh sebesar 539, kemudian

meningkat menjadi 569 pada tahun 2023, dan 625 pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 capaian meningkat signifikan menjadi 874 nilai.

Peningkatan nilai pada tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh adanya pengembangan dan penyesuaian metode penilaian Indeks KAMI, termasuk penambahan komponen atau aspek evaluasi dalam proses penilaian keamanan informasi. Penyesuaian tersebut memberikan ruang bagi perangkat daerah untuk menunjukkan tingkat kematangan pengelolaan keamanan informasi secara lebih komprehensif.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun terus mengalami perbaikan, melalui penguatan tata kelola keamanan informasi, penerapan kebijakan persandian, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas perangkat daerah dalam menjaga keamanan sistem dan informasi pemerintahan.



Grafik 3.6 Capaian Kinerja Keamanan Informasi 5 (lima) Tahun Terakhir

c. Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran dengan Target Akhir Renstra

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah dalam RENSTRA, capaian sasaran Peningkatan Keamanan Informasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2025, realisasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) tercatat sebesar 874, melampaui target RENSTRA sebesar 560. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan pengamanan informasi telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 3.23 Realisasi Kinerja Sasaran
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560 Nilai	874 Nilai	156%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran dengan Provinsi/Nasional

Berdasarkan data capaian tahun 2025, Kota Madiun memperoleh nilai 874, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, data tingkat nasional dan provinsi tidak tersedia (N/a), sehingga belum dapat dilakukan perbandingan langsung dengan standar nasional. Namun, capaian Kota Madiun yang melampaui rata-rata provinsi menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi penguatan keamanan informasi yang diterapkan telah berjalan dengan baik.

Tabel 3.24 Realisasi Kinerja Indikator Sasaran
dibandingkan dengan Provinsi/Nasional

No	Sasaran	Indikator	Kota Madiun	Provinsi	Nasional
1.	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Kami)	N/a	N/a	874 Nilai

e. Analisis atas ketercapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan serta rencana tindak lanjut kedepan

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Kepada Daerah dalam pelaksanaan pelayanan persandian untuk pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. Adanya anggaran yang mendukung program dan kegiatan pelayanan persandian;
3. Melaksanakan sertifikasi ISO 27001, yang merupakan standar sistem manajemen untuk keamanan informasi yang diakui secara internasional.

4. Kerjasama dan koordinasi yang baik, dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, maupun dengan lembaga pusat seperti BSSN.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembaharuan sertifikasi ISO 27001 secara berkala;
2. Meningkatkan kerjasama dengan BSSN dalam implementasi sistem keamanan informasi.
3. Meningkatkan sosialisasi dan implementasi Keamanan Informasi pada Perangkat Daerah.

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan Pelayanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana, serta juknis penggunaan sarana dan prasarana Persandian yang belum optimal;
2. Terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang persandian dan keamanan informasi, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, yang berefek semakin tinggi pula tingkat kualitas gangguan keamanan informasi.

Rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan pengelolaan keamanan informasi tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, antara lain pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem keamanan informasi perangkat daerah; pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga dibidang persandian dan keamanan informasi, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin tentang keamanan informasi ke masyarakat dan perangkat daerah menindaklanjuti perkembangan teknologi yang diiringi semakin beragam pula gangguan keamanan informasi.
2. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Kesadaran Keamanan Siber
4. Penguatan Sistem Monitoring dan Audit

B AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

telah direncanakan. Pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika mengalokasikan anggaran untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, peningkatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kualitas data statistik sektoral, serta penguatan keamanan informasi. Realisasi anggaran tersebut mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	2	3	4	5
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	7.491.731.334,26	6.719.380.213,00	89,69%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	2.930.696.356,00	2.917.446.540,00	99,55%
Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	21.413.896.687,74	21.275.613.406,00	99,35%
Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	100.523.000,00	89.775.075,00	89,30%
Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	146.975.000,00	139.353.002,00	94,84%
Total		32.083.822.378,00	31.141.568.236,00	97,06%

Berdasarkan Tabel 2.3.1, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp31.141.568.236,00 dari alokasi anggaran Rp32.083.822.378,00, atau mencapai 97,06%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh sasaran strategis berada pada kategori tinggi. Realisasi anggaran tertinggi terdapat pada sasaran Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi dan Peningkatan Layanan SPBE, masing-masing sebesar 99,55% dan 99,35%, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.

Sementara itu, realisasi anggaran terendah terdapat pada sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, masing-masing sebesar 89,69% dan 89,30%, yang disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran yang tinggi mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.26 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.491.731.334	6.719.380.213	89,69%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.380.000	9.349.700	99,68%
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.380.000	9.349.700	99,68%
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.424.436.462	2.885.209.970	84,25%
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.424.436.462	2.885.209.970	84,25%
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	199.494.032	99,75%
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	199.494.032	99,75%
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.050.000	11.999.250	99,58%
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.050.000	11.999.250	99,58%
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.351.647.884	3.123.688.463	93,20%
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.351.647.884	3.123.688.463	93,20%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.216.989	489.638.798	99,07%
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.721.001	282.604.315	98,91%
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.510.000	66.826.412	98,99%
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.985.988	140.208.071	99,45%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.930.696.356	2.917.446.540	99,55%
Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.930.696.356	2.917.446.540	99,55%
Sub Kegiatan: Relasi Media	698.265.650	697.765.613	99,93%
Sub Kegiatan: Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	153.441.656	151.191.275	98,53%
Sub Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik	140.606.760	139.223.655	99,02%
Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	23.800.000	23.700.000	99,58%
Sub Kegiatan: Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	7.000.000	6.900.000	98,57%
Sub Kegiatan: Pengelolaan Media Komunikasi Publik	582.375.000	582.058.442	99,95%
Sub Kegiatan: Penyusunan Konten	1.289.877.290	1.282.246.445	99,41%
Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	35.330.000	34.361.110	97,26%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	21.413.896.688	21.275.613.406	99,35%
Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	227.550.000	227.460.314	99,96%
Sub Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	227.550.000	227.460.314	99,96%
Kegiatan: Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.186.346.688	21.048.153.092	99,35%
Sub Kegiatan: Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	64.998.555	57.401.386	88,31%
Sub Kegiatan: Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	366.868.000	365.051.666	99,50%
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	311.400.000	306.337.960	98,37%
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	804.855.635	775.887.882	96,40%
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.653.648.638	5.649.960.119	99,93%
Sub Kegiatan: Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	13.984.575.860	13.893.514.079	99,35%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.523.000	89.775.075	89,31%
Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100.523.000	89.775.075	89,31%
Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	100.523.000	41.569.900	41,35%
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	45.605.500	32.861.000	72,05%
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	37.173.500	15.344.175	41,28%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	146.975.000	139.353.002	94,81%
Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	146.975.000	139.353.002	94,81%
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	29.920.000	23.604.930	78,89%
Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	117.055.000	115.748.072	98,88%
TOTAL	32.083.822.378,00	31.141.568.236,00	97,06%

Berdasarkan Tabel 3.26, total alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.083.822.378,00 dengan realisasi sebesar Rp31.141.568.236,00 atau mencapai 97,06%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah berjalan efektif dan efisien, dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran mencapai 89,69%. Serapan anggaran yang belum optimal terutama dipengaruhi oleh realisasi pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, khususnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang menyesuaikan dengan kebutuhan riil pegawai serta dinamika kepegawaian sepanjang tahun berjalan.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik dengan capaian 99,55%, yang mencerminkan optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik, relasi media, pengelolaan media komunikasi publik, serta penyusunan konten informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika juga mencatat capaian tinggi sebesar 99,35%. Hampir seluruh kegiatan dan sub kegiatan pada program ini terlaksana sesuai rencana, termasuk fasilitasi SPBE, pengembangan aplikasi, penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah, serta penyediaan akses internet bagi perangkat daerah.

Pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, realisasi anggaran mencapai 89,31%. Capaian ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan beberapa sub kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan peran statistik sektoral dan proses bisnis statistik sektoral, yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan kegiatan di lapangan.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mencatat realisasi sebesar 94,81%, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan keamanan informasi telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat efisiensi anggaran pada sebagian sub kegiatan.

Secara keseluruhan, tingkat ketercapaian anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara akuntabel, efektif, dan efisien, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

2. Efisiensi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tentunya didukung oleh sumber daya baik Sumber Daya Manusia, Sumber daya Sarana Prasarana maupun Sumber Daya Anggaran. Sumber daya anggaran digunakan sebagai pendukung operasional program dan kegiatan sehingga menghasilkan sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi output program dan efisiensi RO meliputi: capaian output program, capaian RO, pagu anggaran, dan realisasi anggaran.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Sedangkan efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran yang seharusnya didefinisikan sebagai jumlah

anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output Program atau capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Untuk penilaian SMART satker, yang diperhitungkan adalah efisiensi RO (apabila data realisasi anggaran RO tersedia) atau efisiensi KRO (apabila data realisasi anggaran RO tidak tersedia).

**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

Tabel 3.27 Penghitungan Efisiensi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5=(4/3)x100	6	7	8=5x6	9=8-7
Peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,83	4,89	101,2%	7.491.731.334,26	6.719.380.213,00	7.584.796.319,78	865.416.106,78
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96,00	98,90	103,0%	2.930.696.356,00	2.917.446.540,00	3.019.227.808,42	101.781.268,42
Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4,50	4,82	107,1%	21.413.896.687,74	21.275.613.406,00	22.936.662.674,42	1.661.049.268,42
Peningkatan kualitas data statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	80	75,27	94,1%	100.523.000,00	89.775.075,00	86.914.698,88	-2.860.376,13
Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560	874	156,1%	146.975.000,00	139.353.002,00	229.385.982,14	90.032.980,14
TOTAL				Efisiensi = 110,78%	32.083.822.378,00	31.141.568.236,00	33.856.987.483,64	2.715.419.247,64

3. Pemanfaatan Data Capaian Kinerja Untuk Perencanaan Tahun Berikutnya

Data capaian kinerja merupakan instrumen utama dalam penetapan perencanaan tahun berikutnya, selain berfungsi sebagai catatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya data capaian kinerja, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana target telah tercapai, faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat serta peluang yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Pemanfaatan data capaian kinerja dalam perencanaan tahun berikutnya memberikan manfaat penting, antara lain:

- 1. Menjamin perencanaan yang realistis dan terukur, dengan target berbasis tren capaian sebelumnya.
- 2. Memperkuat akuntabilitas, karena setiap target memiliki dasar yang jelas.
- 3. Memfokuskan intervensi, melalui identifikasi indikator yang perlu diperbaiki, dipertahankan, atau ditingkatkan.
- 4. Mendorong perbaikan berkelanjutan, sebagai dasar peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja yang diperoleh tahun berjalan menjadi rujukan utama dalam menetapkan target tahun berikutnya. Dengan demikian, setiap target baru tidak hanya mencerminkan harapan, tetapi juga memiliki dasar empirik yang jelas. Adapun keterkaitan capaian tahun 2021-2025 dengan target tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.28 Data Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	Capaian					Target 2026	Keterangan Dasar penetapan target 2026
	2021	2022	2023	2024	2025		
Indeks Pelayanan Publik	3,8 Nilai	3,85 Nilai	4,78 Nilai	4,83 Nilai	4,89 Nilai	4,7 Nilai	
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	97,33 Nilai	99,25 Nilai	96,71 Nilai	97,42 Nilai	98,9 Nilai	96.5 Nilai	
Nilai Domain Layanan SPBE	3,95 Nilai	3,37 Nilai	4,63 Nilai	4,5 Nilai	4,82 Nilai	N/a	Target 2026 tidak relevan untuk ditetapkan karena

							indikator pendukungnya sudah tidak berlaku
Indeks Satu Data Indonesia	N/a	N/a	2,88 Nilai	2,18 Nilai	75,27 Nilai	N/a	Target 2026 tidak relevan untuk ditetapkan karena indikator pendukungnya sudah tidak berlaku
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	539 Nilai	539 Nilai	539 Nilai	569 Nilai	560 Nilai	800 Nilai	

Berdasarkan tabel data capaian kinerja tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum menunjukkan capaian yang baik dan cenderung meningkat, meskipun pada beberapa indikator terjadi fluktuasi. Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Keterbukaan Informasi Publik tetap berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang mencerminkan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) juga menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, menggambarkan penguatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, indikator Nilai Domain Layanan SPBE dan Indeks Satu Data Indonesia pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian seiring dengan perubahan kebijakan dan indikator pendukung yang sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut tidak relevan untuk ditetapkan targetnya pada tahun 2026. Penetapan target kinerja tahun 2026 difokuskan pada indikator yang masih berlaku dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya serta arah kebijakan pembangunan daerah.

4. Inovasi

Sampai dengan tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah melaksanakan berbagai inovasi, diantaranya :

- a. Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi)
- Profit M-Tech (Program Wifi Gratis untuk Madiun Genggam Teknologi) merupakan program penyediaan akses WiFi gratis bagi

masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses informasi, mendukung literasi digital, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik;

b. Awak Sigap

Awak Sigap merupakan layanan pengaduan dan informasi berbasis WhatsApp yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan respon cepat, mudah, dan langsung terhadap pertanyaan, aduan, dan kebutuhan informasi masyarakat terkait layanan Pemerintah Daerah;

c. Transformasi Jebol Kiper : PPID Goes to School

PPID Goes to School merupakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan pemahaman dan literasi informasi publik di lingkungan sekolah, khususnya mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik, guna menumbuhkan budaya keterbukaan informasi sejak dini.

d. SUPER TEKTONIK

Merupakan inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung pelayanan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik untuk mewujudkan proses administrasi yang cepat, efisien, aman, dan berintegritas.

e. PPID Roadshow

PPID Roadshow merupakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perangkat daerah terhadap keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi, pendampingan, dan penguatan peran PPID secara langsung di setiap perangkat daerah

f. E-Proteksi (Edukasi Perlindungan Data Pribadi Untuk Keamanan Informasi)

E-Proteksi (Edukasi Perlindungan Data Pribadi untuk Keamanan Informasi) merupakan inovasi edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam melindungi data pribadi serta menjaga keamanan informasi dari berbagai ancaman kejahatan siber melalui penerapan praktik keamanan digital yang tepat.

- g. Si Manpro Gesit (Aplikasi Manajemen Progres Kiat menuju Kinerja Melesat)

Si Manpro Gesit (Aplikasi Manajemen Progres Kiat menuju Kinerja Melesat) merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memantau dan mengelola progres kinerja serta realisasi anggaran Pemerintah Daerah secara terintegrasi, guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

- h. MAS ATTA (Manajemen Monitoring dan Evaluasi Satu Data)

MAS ATTA (Manajemen Monitoring dan Evaluasi Satu Data) merupakan aplikasi statistik sektoral yang dikembangkan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi data sektoral secara terintegrasi, guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia serta menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan Pemerintah Daerah.

- i. MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga)

Layanan Mbangun Swarga pada dasarnya adalah mengintegrasikan data penerima layanan bantuan dan penerima manfaat/layanan dari Pemerintah Kota Madiun. Dengan aplikasi ini, bisa didapatkan data yang dibutuhkan secara keseluruhan. Misalnya jumlah penduduk yang menerima bantuan sosial DTKS, bantuan Siaga Kita yang anaknya menerima beasiswa mahasiswa (Be-Smart) dari Pemkot, atau data penerima layanan antrian RSUD yang juga menjadi pencari kerja (Sicaker), dan data – data yang lain sesuai yang dibutuhkan.

- j. MANEKIN (Manajemen Kinerja Kota Madiun)

MANEKIN (Manajemen Kinerja Kota Madiun) merupakan sistem manajemen kinerja yang dikembangkan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi kinerja pegawai dan perangkat daerah secara terukur dan objektif, guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kota Madiun;

- k. Market Place Kota Madiun (e-Pasar Kota Madiun)

Market Place Kota Madiun (e-Pasar Kota Madiun) merupakan platform digital yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung promosi dan transaksi produk pelaku

usaha lokal secara daring, guna memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dae

**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi tahun 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja, semua sasaran telah tercapai dengan kategori capaian Sangat Baik/ Istimewa. Salah satu indikator kinerja yang juga diukur pada tahun sebelumnya, yaitu Indeks Pelayanan Publik, mengalami peningkatan sebesar 0,02%, dari 99,11% menjadi 99,13%, yang menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan publik. Sedangkan untuk realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp31.141.568.236,00 dari pagu Rp32.083.822.378,00, atau sebesar 97,06%, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisa nilai efisiensi anggaran diperoleh data bahwa semua target sasaran telah tercapai dengan kategori Sangat Baik/ Istimewa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara **“Sangat Efisien”**, dengan dukungan capaian kinerja yang optimal. Ke depan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun akan terus melakukan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program agar efektivitas dan efisiensi kinerja dapat terus ditingkatkan.

B. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam rangka pencapaian target yang telah ditentukan, dapat disimpulkan secara umum terdapat permasalahan diantaranya:

1. Tantangan terkait infrastruktur teknologi meliputi keberlanjutan, skalabilitas, dan integrasi sistem yang kompleks. Penting untuk memiliki infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan dan perubahan serta dapat terintegrasi dengan berbagai pihak baik ekosistem bisnis maupun ekosistem pemerintahan.

2. Keamanan data merupakan tantangan utama dalam menyelenggarakan layanan elektronik. Perlindungan data pribadi dan informasi sensitif harus menjadi prioritas utama. Serangan siber seperti peretasan, *malware*, dan serangan *phishing* dapat merusak integritas sistem dan mengancam kepercayaan pengguna.
3. Tingkat literasi digital masyarakat maupun pegawai pengampu layanan. Ketidaksetaraan dalam tingkat keahlian penguasaan teknologi juga menjadi masalah, dan diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat maupun pegawai.
4. Budaya Organisasi, Transformasi digital sering kali memerlukan perubahan budaya dalam organisasi. Resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman, dan ketidakpastian dapat menjadi hambatan. Penting untuk membangun budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Semua yang terlibat dalam kegiatan transformasi digital harus dapat berpikir dan memahami proses bisnis layanan secara digital.
5. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan layanan elektronik juga tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Tantangan ini mencakup mengajak masyarakat untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi secara positif berdasarkan pengalaman masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan digital.

C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas untuk peningkatan kinerja diantaranya:

1. Optimalisasi Digitalisasi – Meningkatkan efisiensi melalui integrasi teknologi informasi.
2. Evaluasi dan Penyempurnaan Program – Melakukan analisis mendalam terhadap capaian dan kendala program untuk perbaikan lebih lanjut.
3. Peningkatan Kapasitas SDM – Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada pegawai agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan.
4. Penguatan Kolaborasi – Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat pencapaian target strategis.

5. Transparansi dan Akuntabilitas – Memastikan sistem monitoring dan evaluasi berjalan optimal untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta input kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

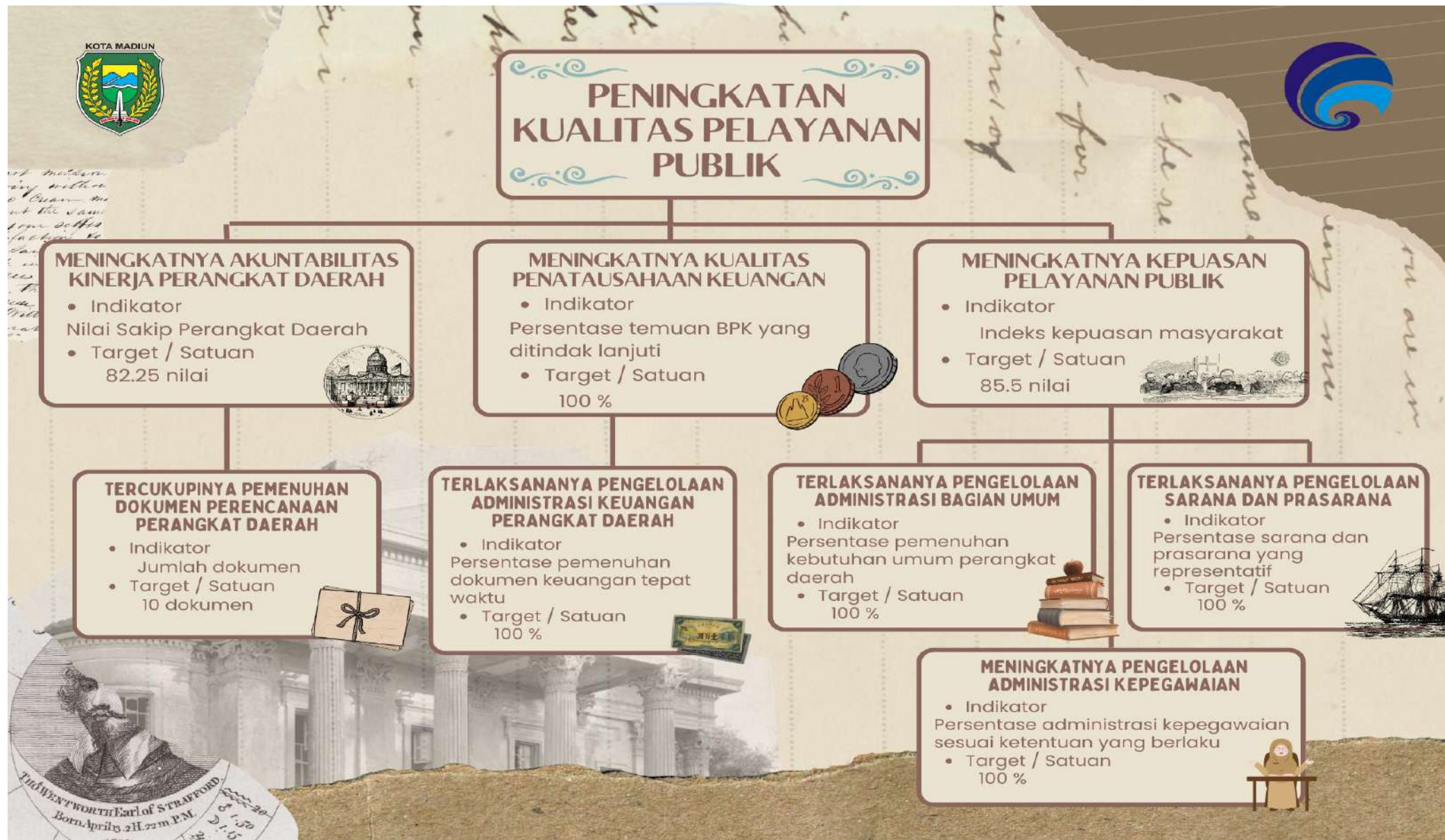
**DIS
KOM
INFO.**
M A D I U N K O T A

LAMPIRAN

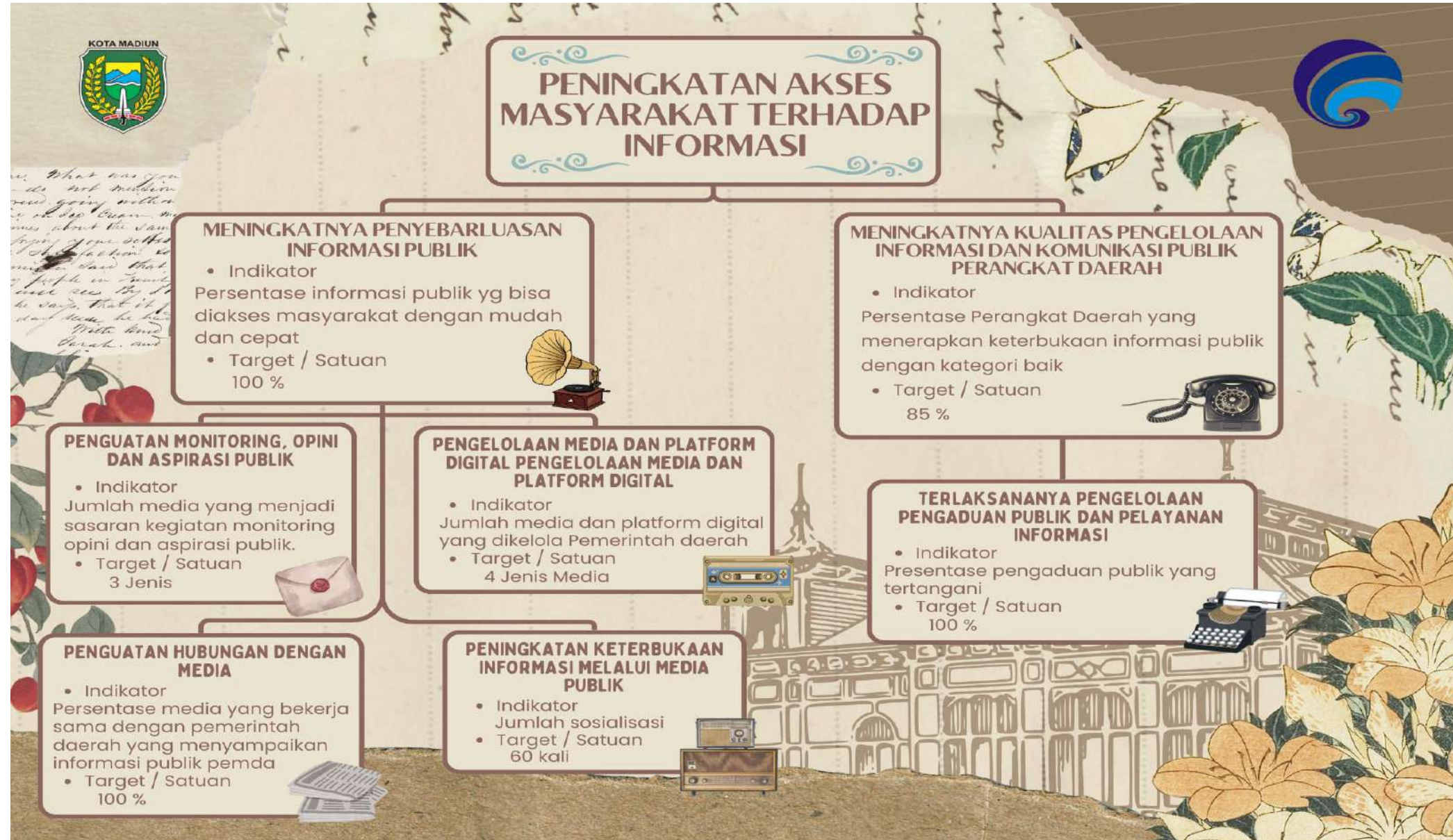
A. POHON KINERJA



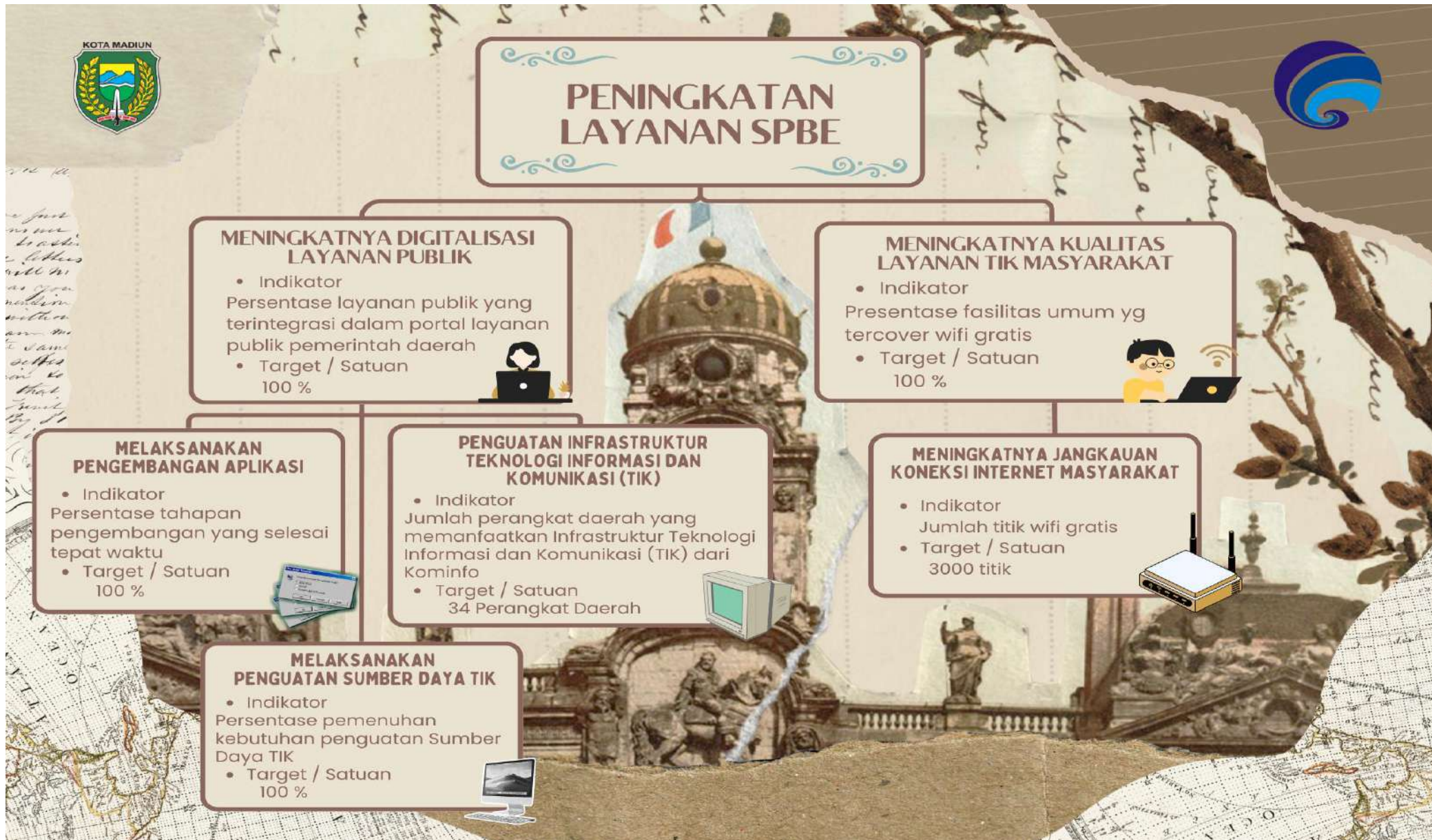
A.1 Pohon Kinerja : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



A.2 Pohon Kinerja : Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi



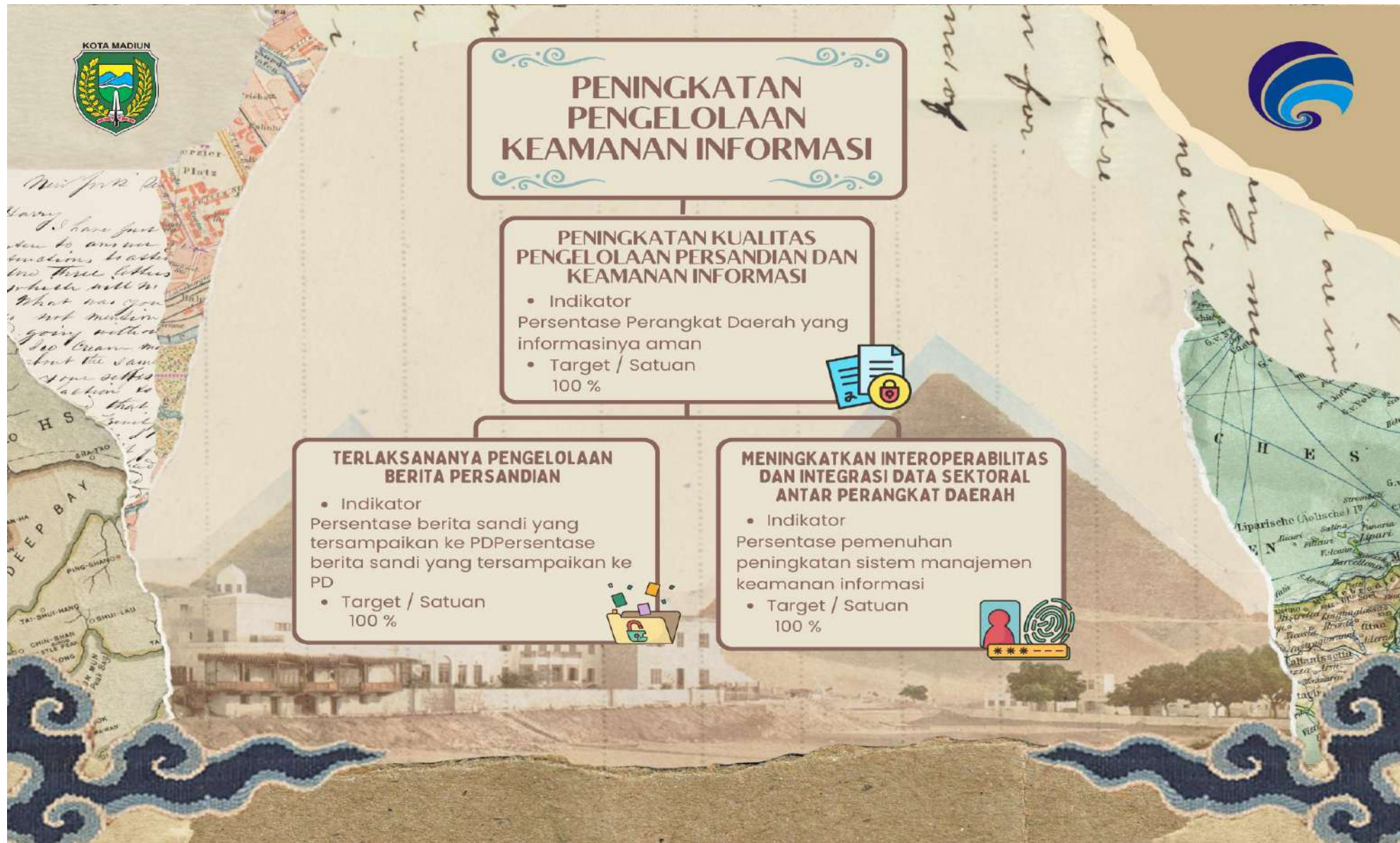
A.3 Pohon Kinerja : Peningkatan Layanan SPBE



A.4 Pohon Kinerja : Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral



A.5 Pohon Kinerja : Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi



B. MATRIK RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
			2	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
			6											
Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat	82,25	8,004,574,262	82,75	7,944,870,138	82,75	15,949,444,400	
			6											
			2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	215,000,000	100%	215,000,000	100%	430,000,000	
			6		0									
			1		1									

MADIUNKOTA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2161201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	215,000,000	5 Laporan	215,000,000	5 Laporan	430,000,000		
			2161202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5,600,000,000	100%	5,600,000,000	100%	11,200,000,000		
			2161202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	5,600,000,000	32 Orang	5,600,000,000	64 Orang	11,200,000,000		
			2161206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	650,000,000		
			2161206	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	300,000,000	25 Laoran	350,000,000	50 Laporan	650,000,000		
			2161207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	180,000,000	100%	147,370,138	100%	327,370,138		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2161207	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	1 Unit	25,000,000	2 Unit	55,000,000		
			2161207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	150,000,000	14 Unit	122,370,138	28 Unit	272,370,138		
			2161208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	1,127,574,262	100%	1,150,000,000	100%	2,277,574,262		
			2161208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,127,574,262	1 Laporan	1,150,000,000	2 Laporan	2,277,574,262		
			2161209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	582,000,000	100%	482,500,000	100%	1,064,500,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2161209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	200,000,000	30 Unit	165,000,000	60 Unit	365,000,000		
			2161209	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,000,000	3 Unit	135,000,000	6 Unit	335,000,000		
			2161209	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	182,000,000	50 Unit	182,500,000	100 Unit	364,500,000		
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	2162	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84%	3,425,000,000	86%	3,733,250,000	86%	7,158,250,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2162201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	3,425,000,000	100%	3,733,250,000	100%	7,158,250,000		
			2162201	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	1,300,000,000	12 Laporan	1,650,000,000	24 Laporan	2,950,000,000		
			2162201	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	250,000,000	4 Komunitas	250,000,000	8 Komunitas	500,000,000		
			2162201	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	200,000,000	200 Permohonan	200,000,000	400 Permohonan	400,000,000		
			2162201	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Presentase	50,000,000	100 Pesentas e	65,000,000	200 Presentas e	115,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2162219	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	25,000,000	12 Rekomendasi	25,000,000	24 Rekomendasi	50,000,000		
			2162211	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1,000,000	1 Media	1,500,000	2 Media	2,500,000		
			2162231	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1,499,000,000	120 Konten	1,441,750,000	240 Konten	2,940,750,000		
			2162241	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	100,000,000	30 Orang	100,000,000	60 Orang	200,000,000		
	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	2163	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	15,699,953,078	100%	15,651,250,000	100%	31,351,203,078		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2163201	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	197,550,000	100%	197,550,000	100%	395,100,000		
			21632014	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	197,550,000	1 Dokumen	197,550,000	1 Dokumen	395,100,000		
			2163202	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	15,502,403,078	100%	15,453,700,000	100%	30,956,103,078		
			2163205	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 laporan	97,687,078	2 Laporan	103,700,000	4 Laporan	201,387,078		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2163220	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	364,696,000	2 Aptikasi	370,000,000	4 Aplikasi	734,696,000		
			2163221	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	335,400,000	1 Aplikasi	335,400,000	2 Aplikasi	670,800,000		
			216323	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 Unit	1,015,419,375	34 Unit	894,600,000	68 unit	1,910,019,375		
			216324	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat at Daerah	1,021,180,620	34 Perangkat at Daerah	1,050,000,000	68 Perangkat at Daerah	2,071,180,620		
			216320	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat at Daerah	12,668,020,005	34 Perangkat at Daerah	12,700,000,000	68 Perangkat at Daerah	25,368,020,005		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			220		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	220		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	250,000,000			
			220	201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	125,000,000	1 Survey	125,000,000	2 Survey	250,000,000			
			220	201	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Presentase	55,000,000	100 Presentase	55,000,000	200 Presentase	110,000,000			
			220	201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	100,000,000			
			220	201	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	40,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator KinerjaProgram (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokas		
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			2 2 1 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2 2 1 1	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	380,000,000			
			2 2 1 1	2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	380,000,000			
			2 2 1 1	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	40,000,000	8 Laporan	80,000,000			
			2 2 1 1	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat at Daerah	150,000,000	34 Perangkat at Daerah	150,000,000	68 Perangkat at Daerah	300,000,000			

C. PERJANJIAN KINERJA 2025



WALI KOTA MADIUN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOOR AFLAH, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd**

Jabatan : **WALI KOTA MADIUN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Madiun, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

NOOR AFLAH, S.Kom
NIP 197609072003121007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96 Nilai
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4.83 Nilai
3.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	80 Nilai
4.	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560 Nilai
5.	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4.5 Nilai

No	Program	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.491.731.334,26
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.930.696.356,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	21.413.896.687,74
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100.523.000,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	146.975.000,00
	Jumlah	Rp. 32.083.822.378,00

WALI KOTA MADIUN



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd

Madiun, 01 Oktober 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



NOORAFLAH, S.Kom
NIP 197609072003121007

D. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	48,3 Nilai	48,9 Nilai	101,2%
2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	96 Nilai	98,9 Nilai	103%
3	Peningkatan Layanan SPBE	Nilai Domain Layanan SPBE	4,5 Nilai	4,82 Nilai	107,1%
4	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	80 Nilai	75,27 Nilai	94,1%
5	Peningkatan Pengelolaan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560 Nilai	874 Nilai	156%

Keterangan :

1. Kolom 1 : Penomoran;
2. Kolom 2 : Diisi dengan kebijakan merujuk pada Sasaran yang tertuang pada Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah (Eselon 2);
3. Kolom 3 : Diisi dengan indikator kinerja sasaran;
4. Kolom 4 : Diisi dengan target yang ingin dicapai;
5. Kolom 5 : Diisi dengan realisasi capaian target.

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun


NOOR AFLAH, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19760907 200312 1 007

E. DOKUMENTASI PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	INSTANSI	DOKUMENTASI
1	2	3	4
1	Penghargaan Terbaik 3 Jatim Public Relation Award 2025 Kategori Program Komunikasi Publik	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
2	Penghargaan Kategori Smart Branding Gerakan Menuju Smart City dalam Implementasi Program Smart Branding 2024	Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)	

3	Penghargaan Juara 2 SATA Jatim Award 2025 Kategori Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk Pemerintah Kota Madiun	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
4	Penghargaan Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dengan nilai 98,90 KI Award 2025	Komisi Informasi Jawa Timur	

5	Penghargaan TOP 15 Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (INOTEK) dengan judul inovasi : MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
6	Penghargaan TOP Digital Implementation 2025 Bintang 5 untuk Pemerintah Kota Madiun	majalah IT Works.	
7	Penghargaan TOP Leader on Digital Implementation 2025 untuk Wali Kota Madiun	majalah IT Works.	
8	Penghargaan TOP CIO on Digital Implementation 2025 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	majalah IT Works.	

9	Penghargaan Terbanyak ke 2 Deklarasi dan Sosialisasi Pencegahan Judi Online serentak "Digital Sehat Tanpa Judi Online"	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	
---	--	--------------------------------	---

